

PEMERINTAHAN YANG MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT *GOVERNMENT THAT MAKES THE PEOPLE HAPPY*

Riani Bakri¹ dan Murtir Jeddawi²

^{1,2} Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan
Email: rianibakri62@gmail.com - murtirjeddawi15@gmail.com

ABSTRAK

Selama ini, pendekatan mengukur keberhasilan pembangunan secara obyektif, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, atau penurunan angka kemiskinan. Perspektif dimaksud, tidak dapat disalahkan. Namun, secara subyektif, kebahagiaan masyarakat/warga Negara, setidaknya juga sudah perlu mendapatkan perhatian. Idealnya, kondisi obyektif dan subyektif diharapkan berjalan seiring. Fakta hasil kajian BPS (2021) tidaklah demikian. Dari perspektif pemerintahan, kondisi dimaksud harusnya menjadi perhatian utama dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk membuat Kebijakan, yang idealnya selain mengarah pada keberhasilan indikator obyektif makro, tetapi juga indikator mikro subyektif yaitu keberhasilan dalam membuat kebahagiaan masyarakat/warga Negara.

Kata kunci: pemerintahan, kebahagiaan.

ABSTRACT

So far, this approach has objectively measured the success of development, economic growth, the Human Development Index, or a reduction in the poverty rate. The intended perspective, can not be faulted. However, subjectively, the happiness of the people/citizens, at least, also needs attention. Ideally, objective and subjective conditions are expected to go hand in hand. The facts from the results of the BPS study (2021) are not like that. From a government perspective, this condition should be a major concern with the functions and authorities it has. For this reason, strong leadership is needed to make policies, which ideally not only lead to the success of macro objective indicators, but also subjective micro indicators, namely success in making the community/citizens happy.

Keywords: government, happiness.

PENDAHULUAN

Secara garis besar eksistensi Negara, setelah pemenuhan syarat-syarat berdirinya suatu negara – Konvensi Monteveido, adanya wilayah negara, adanya penduduk, adanya pemerintah yang berdaulat dan pengakuan internasional -, memiliki tujuan tertentu, di mana tujuan tertentu tersebut pada umumnya untuk memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan warga negaranya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada alinea IV Pembukaan UUD 1945, ditegaskan, tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan sumber daya yang dimiliki, setiap Negara melalui pemerintah yang berdaulat melaksanakan fungsi- fungsi pemerintahan secara umum dan kondisi aktual dalam Negara untuk mewujudkan tujuan negaranya, termasuk Indonesia. Kebijakan dan Program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan telah dilakukan dengan intensitas dan variasi yang berbeda tiap masa pemerintahan, baik era Orde Lama, Orde Baru, Era Transisi maupun Era Reformasi.

Selama ini, pembangunan secara umum diukur dengan ukuran obyektif misalnya dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi ukuran subyektif, Indeks kebahagiaan untuk melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sebagai ukuran hasil pembangunan—belum menjadi konsensus (BPS, 2022).

Harian Kompas cetak, edisi 20 Maret 2023, melaporkan, Negara- Negara di dunia saling berlomba mengejar pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun besarnya pendapatan, pendidikan yang baik, dan tingginya kualitas layanan kesehatan, tidak serta merta membahagiakan masyarakat. Kebahagiaan masyarakat dipengaruhi banyak hal, bukan ekonomi semata. Pada edisi tersebut juga dikonstatir pendapat Direktur Institut for Advanced Studies in Economic and Business UI, Turro S Wongkaren, tidak mudah menghubungkan antara pembangunan ekonomi dan kebahagiaan. Dikatakan, “mereka yang kalah secara ekonomi, bisa saja lebih bahagia dibanding yang sukses secara ekonomi.”

Pada edisi Harian Kompas tersebut juga merilis, peringkat 10 (sepuluh) besar Negara paling bahagia tahun 2022, yaitu peringkat 1, Finlandia (nilai 78,21), 2. Denmark (76,36), 3. Eslandia (75,57), 4. Swiss (75,12), 5. Belanda (74,15), 6. Luksemburg (74,04), 7. Swedia (73,84), 8. Norwegia (73,65), 9. Israel (73,64), dan peringkat 10. Selandia baru (72,00). Peringkat dan Indeks kebahagiaan Negara Asean 2022 (Kompas, 20/3/2023), Singapura (nilai 64,80) peringkat 27 dari 146 negara, Filipina (nilai 59,04, peringkat 60 dari 146 negara), Thailand (58,91, 61/146), Malaysia (57,11, 70/146), Vietnam (54,85, 77/146), Laos (51,40, 95/146), Kamboja (46,40, 114/146), dan Myanmar (43,94, 126/146). Indonesia pada Tahun 2014 nilai Indeks Kebahagiaan (68,28), 2017 (nilai 70,69), dan 2021 (nilai 71,49).

Sepuluh provinsi dengan Nilai Indeks kebahagiaan tertinggi tahun 2021, Maluku

Utara 9 nilai 76,3), Kalimantan Utara (76,3), Maluku (76,3), Jambi (75,2), Sulawesi Utara (75,0), Kepulauan Riau (74,8), Gorontalo 74,8), Papua Barat (74,5), Sulawesi Tengah (74,5) dan Sulawesi Tenggara (74,0). Provinsi dengan sor Indeks kebahagiaan di bawah rata-rata nasional tahun 2021 (nilai 71,49), yaitu, Bali 9 71,4), Sumatera Barat (71,3), Aceh (71,2), DKI Jakarta (70,7), Sumatera Utara (70,6), Nusa tenggara Timur (70,3), Jawa barat (70,2), Nusa Tenggara Barat ((70,0), Papua (69,9), Bengkulu (69,7) dan Banten (68,1). Provinsi lainnya yang tidak termasuk kategori di bawah rata- rata nasional berarti berada di posisi diatas dan/ atau sama dengan rata- rata nasional (*Harian Kompas, edisi, 20/3/2023*).

Dengan data tersebut diatas, setidaknya dapat disimpulkan pada dua hal, pertama kesuksesan pembangunan dari dimensi obyektif seperti pertumbuhan ekonomi , indeks pembangunan manusia dan indikator makro lainnya merupakan keharusan, *conditio sine qua non*. Akan tetapi kebahagiaan masyarakat sebagai hasil atau implikasi dari pembangunan dimaksud juga seharusnya penting menjadi perhatian. Namun demikian faktanya tidaklah demikian, terjadi kontraksi atau inlinearitas atau *un supporting each orthes*. Dalam Negara demokrasi selain pemenuhan hak-hak individu warga masyarakat, seperti kebebasan berpendapat, aksesibilitas informasi secara terbuka sesuai sistem pemerintahan Negara, perlakuna yang sama di depan hukum dan pemerintahan, aksesibilitas berusaha dan berkarya, dan termasuk ‘hak kebahagiaan’. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menegaskan, ‘perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah.’

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, tulisan ini, analisis lebih penekanan pada pelaksanaan atau perwujudan fungsi-fungsi pemerintahan (kewajiban pemerintah) yang membahagiakan masyarakat.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka terhadap teori, norma dan dokumen data indeks kebahagiaan nasional. Analisis, dengan metode deskriptif kualitatif.

TEORI DAN PEMBAHASAN

Kebahagiaan dan Pertumbuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan merupakan kesenangan dan ketenteraman hidup lahir dan bathin. Diartikan pula sebagai konsep evaluasi kehidupan yang menggambarkan kondisi yang *good life* dan *meaningful life*. Kebahagiaan tidak berbeda dengan *life satisfaction*, di mana kebahagiaan dapat didefinisikan sebagai '*over all appreciation of one's life as a whole*' (Veenhoven, dalam BPS, 2022). Dengan pengertian tersebut, status kebahagiaan secara ilmiah telah dilakukan pengukuran oleh BPS sejak 2014 melalui Survey Pengukuran Tingkat kebahagiaan yang dilakukan 3 tahun sekali. Pada tahun 2021 tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia diukur dari 3 (tiga) dimensi yaitu kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*affect*) dan makna hidup (*eudaimonia*) (BPS, 2022).

Dalam Negara kesejahteraan modern, pada dasarnya Negara melalui Pemerintah terlibat dalam semua aspek kehidupan masyarakat, *from the cradle to the grave*, termasuk dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Negara melakukan intervensi dalam berbagai dimensi kehidupan agar tetap keseimbangan, dan tidak terjebak pada pola *homo homini lupus dan bellum omnium contra omnes* dari Hobbes. Pertumbuhan ekonomi dan indikator ekonomi lainnya termasuk peningkatan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mulai dianalisis manfaatnya besarnya bagi penduduk secara keseluruhan. Termasuk Pemerintah saat ini mengharapkan konkretisasi hasil dan manfaat *Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* bagi penurunan

angka kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting dan peningkatan investasi. Secara idela memang harusnya terhadap kelerasan antara keberhasilan program pembangunan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk indeks kebahagiaan masyarakat.

Ketidakselarasan antara peningkatan pendapatan dengan pertambahan kebahagiaan masyarakat, sejak awal telah dilakukan studi ekonom AS, Richard Easterlin, yang melahirkan paradox Easterlin 1974. Peningkatan pendapatan masyarakat pada ssatu titik tertentu memang meningkatkan kebahagiaan. Namun, saat pendapatan terus meningkat, kebahagiaan masyarakat tidak ikut bertambah. Namun demikian walaupun menimbulkan paradox, masih banyak Negara focus pada pembangunan ekonomi untuk membahagiakan rakyatnya. Dari pengalaman AS, Inggris, Jerman dan Italia tahun 1820 – 2009, yang dianalisis Daniel SgROI dan Eugenio proto dari Inggris, menunjukkan membaiknya ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat membuat masyarakat bahagia. Dalam analisis Harian Kompas, Provinsi – provinsi dengan nilai Indeks Pembangunan manusia (IPM), tinggi justru memiliki nilai kebahagiaan yang relative rendah. Sebaliknya, provinsi yang dianggap lebih miskin, pendidikan kurang, dan usia harapan hidup rendah, justru lebih menampakkan kebahagiaan. (*Harian Kompas cetak*, 20/3/2023). Pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya seharusnya secara total member pengaruh atau peran optimal dalam perwujudan kebahagiaan masyarakat, selain prasyarat lainnya. Elaborasi dimensi yang berpengaruh satu sama lain, dirajut dalam kebijakan yang sistemik dari kepemimpinan yang kuat dan transformatif dinamis.

Kewajiban Pemerintah

Negara sebagai entitas kekuasaan dengan kewajiban mewujudkan tujuan Negara, dan pemerintah sebagai lembaga yang berfungsi

mendinamisasi tugas Negara, menggunakan instrument kelembagaan pemerintahan. Lembaga–lembaga pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing–masing, secara ideal mendinamisasi fungsi– fungsi secara elaboratif satu sama lain sebagai suatu sistem. Fungsi – fungsi pemerintahan dengan pendekatan sistem dimaksud, akan saling berkolaborasi (*colaboratif governance*) sehingga output bahkan outcome dari tiap fungsi saling melengkapi satu sama dalam pendekatan sistem dimaksud.

Fungsi–fungsi pemerintahan yang terkompart pada sejumlah lembaga, seperti fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan atau fungsi primer dan sekunder (Rasyid dan Ndraha dalam Labolo, 2006).

Apabila fungsi–fungsi dimaksud melalui instrument pemerintahan, peraturan perundang–undangan dan peraturan kebijakan, maka tiap out put kebijakan/peraturan perundang–undangan seharusnya menjadi in put fungsi lainnya. Pada tataran praktis, apabila fungsi pelayanan berjalan akan memberikan implikasi pemerataan. Demikian pula, fungsi pembangunan akan memberikan implikasi kesejahteraan, fungsi pemberdayaan akan memberiklan implikasi kemandirian dan fungsi pengaturan akan melahirkan implikasi kepastian dan keteraturan.

Dengan demikian apabila dikaitkan keberhasilan Negara dan/daerah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, ataupun indeks pembangunan manusia yang di dalamnya terdiri dari pertumbuhan ekonomi, usai harapan hidup dan pemerataan pembangunan setidaknya memiliki korelasi dengan terlayannya kebutuhan dasar masyarakat baik bidang pendidikan maupun bidang kesehatan dan infrastruktur pendukung.

Munculnya fenomena sebagaimana tersbeut di atas, tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak diperlukan untuk membuat masyarakat

bahagia. Pertumbuhan ekonomi atau indeks pembangunan manusia, tetap sangat diperlukan dalam menstimulasi sektor lain secara akseleratif. Bahkan adalah kondisi yang tidak mungkin dicapai kebahagiaan masyarakat tanpa adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan, karena wujud pertumbuhan ekonomi itu, melalui proses kulminasi pemanfaatan sumber daya dan investasi.

Namun demikian, menurut *The Economist* 2019 (Harian Kompas, 2023), untuk membuat masyarakat bahagia, adalah factor kesehatan, hidup yang damai, tidak ada konflik/perang. Menurut The Economist, bertambahnya usia harapan hidup satu tahun, dapat meningkatkan *Product Domestic Bruto* (PDB) nasional 4,3 persen. Namun di sisi lain, dengan adanya perang selama setahun, dapat menurunkan PDB sebesar 30 persen. Unsur kebahagiaan tidak hanya semata factor eekonomi, kondisi damai, tetapi juga kondisi kesehatan, kepribadian, struktur demografi, kehidupan sosial, budaya, agama atau kepercayaan dapat mempengaruhi kebahagiaan masyarakat. Demokratisasi, keluarga harmonis dan kuat, kebebasan informasi, dan keeberhargaan diri, menjadi faktor berpengaruh (Suparman dalam Kompas, 2023). Selain itu, situasi sosial politik, indeks persepsi korupsi, stagnasi indeks demokrasi, indeks pembangunan jender.

Dengan demikian, dikatakan bahwa hasil pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dan aspek lainnya tidaklah dipertentangkan dengan ketidakhahagiaan masyarakat. Justru dengan pertumbuhan ekonomi menjadi mainstrain memicu aspeknya lainnya secara akseleratif indikator–indikator terwujudnya kebahagiaan masyarakat. Dari fakta – fakta yang dipublish BPS, mengenai indeks kebahagiaan masyarakat secara agregatif telah nampak di tiap provinsi, walaupun masih ada indeks di bawah rata- rata nasional. Kebijakan komprehensif terhadap berbagai sektor menjadi perhatian yang kemudian tertuang baik dalam

bentuk peraturan perundang–undangan maupun dalam peraturan kebijakan. Dengan demikian kebijakan dimaksud adalah kebijakan aktif, bukan lagi kebijakan yang tidak melakukan (*government to do*). Hal substantive yang memerlukan perhatian secara komprehensif adalah pada tataran perencanaan program dan anggaran sebagai tahapan awal untuk proses kebijakan berikutnya. Sejak awal perencanaan komprehensif multi dimensi atau dikenal dengan istilah *whole goventment* menjadi acuan secara integratif. Indikator–indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi–fungsi pemerintahan tidak saja indikator obyektif seperti pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia akan tetapi juga indikator subyektif seperti indeks kebahagiaan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas, disimpulkan bahwa indeks kebahagiaan pada provinsi–provinsi di Indonesia, telah nampak walaupun masih ada beberapa provinsi yang di bawah rata-rata nasional. Namun dengan melihat frekwenai skornya, pada dasarnya fungsi–fungsi pemerintah melalui instrument kebijakan telah memberi pengaruh signifikan terhadap hasil pembangunan baik untuk

sektor ekonomi, demokrasi dan kebahagiaan masyarakat. Kebijakan berbasis kontekstual, konsistensi dan berkesinambungan menjadi kunci tercapainya kebahagiaan masyarakat secara agregat optimal, didukung pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia yang optimal, iklim demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga kehidupan yang kondusif serta kehidupan sosial kemasyarakatan yang dinamis tetapi harmonis. Hasil Pemilu 2024 mendatang diharapkan melahirkan pemimpin yang berkomitmen melanjutkan, meningkatkan dan menjamin kesinambungan hasil yang dicapai secara sistemik berbasis *good governance, collaborative governance, dynamic governance dan sounding governance* yang transformatif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried dkk. 2015. Filsafat Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung.
- Dwiyanto, Agus, tt. Reformasi Birokrasi, Gramedia, Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan, Persada, Jakarta
- Harian Kompas cetak, edisi 20 Maret 2023.